

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PANGKALPINANG

**Salfan Chalvin T. L. Huki (1), Aryo Bimo Pangestu (2), Ria Anisa (3), Fery Markus (4),
Futicha De'i Kinasih (5)**

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Email Korespondensi: riaanisa1990@gmail.com³

Abstrak: Pandemi Covid 19, pengangguran menciptakan gelombang pengangguran yang dahsyat di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan oleh berbagai level pemerintahan, dari level daerah hingga nasional. Pengangguran menjadi salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah, karena dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Besarnya dampak pengangguran ini, menjadi urgensi penulisan artikel ini. Pengangguran yang dipilih berjenis pengangguran terbuka dalam kurun waktu pandemic covid 19, tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran eksplanatif. Meskipun ini merupakan tugas pemerintah, namun tidak dapat menjadi actor tunggal dalam penanganan persoalan pengangguran di Kota Pangkalpinang. Sehingga penulisan menggunakan konsep *collaborative governance* dalam penanganan pengangguran. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terbukti adanya beberapa kali even job fair yang diselenggarakan oleh OPD tenaga kerja Kota Pangkalpinang. (2) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Bentuk kerjasamanya dalam program kesempatan kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB. (3) Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Kolaborasi berhasil menghasilkan kebijakan kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor melalui layanan digital.

Kata kunci : Pengangguran Kota, Pemerintahan Kolaboratif, Pengangguran Kota Pangkalpinang

Abstract: *The COVID-19 pandemic and unemployment have created a devastating wave of unemployment in all countries, including Indonesia. Efforts have been made by various levels of government, from regional to national levels. Unemployment is a barometer of the success of regional heads because it can be an indicator for evaluating the success of economic development. The magnitude of the impact of unemployment is the urgency of writing this article. The selected unemployment type was open unemployment during the COVID-19 pandemic, 2020–2023. This research uses qualitative methods with explanatory explanations. Even though this is the government's task, it cannot be the sole actor in handling the unemployment problem in Pangkalpinang City. So the writing uses the concept of collaborative governance in handling unemployment. The results of this research conclude (1) that there is collaboration between the government and the community, as evidenced by the existence of several job fair events held by the Pangkalpinang City workforce OPD. (2) There is collaboration between the government and academics. The form of collaboration is in the area-based employment opportunity program carried out with the Ministry of Manpower and IPB. (3) Collaboration between the government and the private sector. Collaboration succeeded in producing a policy facilitating licensing service procedures for investors through digital services.*

Keywords: *City Unemployment, Collaborative Governance, Pangkalpinang City Unemployment*

Article History :

Received 28 Februari 2024; Revised 5 Mei 2024; Accepted 1 Juli 2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran, dua persoalan klasik yang biasa dialami oleh kebanyakan negara maju maupun negara sedang berkembang. Seperti halnya dengan Indonesia, sampai saat ini masih berjabaku menangani problematika pengangguran. Sebagaimana diketahui, pengangguran urgen untuk ditangani karena dapat berdampak pada kemiskinan. Kondisi ini memburuk pada tahun 2020 hingga pertengahan 2023, Indonesia dan seluruh negara di dunia melewati wabah penyakit Covid-19. Pandemi berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama pada sektor ekonomi. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) mengatur aktivitas masyarakat dalam bekerja bahkan dibatasi. Akibatnya banyak dari UMKM dan perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal. Terlebih setelah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, dan Bali. Kebijakan *lockdown* dan PSBB mengakibatkan beberapa perusahaan maupun UMKM mengalami kerugian dan gulung tikar. Akibatnya, terjadi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara tidak langsung, PHK menimbulkan gelombang pengangguran ditengah masa pandemi. Maraknya tingkat pengangguran menjadi salah satu dampak pandemi paling nyata. *Proyek Core Indonesia* menyatakan bahwa peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengangguran terbuka penyebabnya karena adanya wabah Covid 19, mengakibatkan berubahnya tingah laku masyarakat serta aturan soal PSBB (Fahri et al., 2020).

Tingginya angka pengangguran mengakibatkan efek domino. Pengangguran menurunkan tingkat produktivitas serta penghasilan masyarakat, sekaligus menimbulkan persoalan kemiskinan dan juga kriminalitas. Menurut catatan BPS, tahun 2020 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menyentuh angka 7,07 persen dan rasio ini naik dari 5,23 persen dibanding tahun 2019 (Hendartyo, 2020). Selain faktor pandemic, salah satu faktor pengangguran yaitu melonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan perbanyak lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga mengakibatkan para generasi lulusan anak muda terpaksa menganggur sementara waktu dan menunggu harapannya untuk dapat bekerja (Verianty, 2022)

Sebagai ibu kota provinsi, Kota Pangkalpinang merupakan daerah terpadat di Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah penduduknya berdasarkan BPS tahun 2020 sebanyak 216.893 jiwa. Menurut sumber data LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2019 dan 2020, menerangkan tingginya angka pengangguran dan kasus konflik industrial. Ironinya, data menunjukkan masih rendahnya anggaran pengadaan diklat tenaga kerja dengan basis kompetensi dan kewirausahaan (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020, 2021). Selanjutnya, pada hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) di tahun 2020 memaparkan data tentang rasio penduduk di Kota Pangkalpinang yang telah berumur lebih di atas 15 tahun yang tergolong dengan Penduduk Usia Kerja (PUK) memiliki jumlah 161.793 jiwa. Sejumlah 62,37 persen penduduk bekerja dan/atau yang sedang mencari perkerjaan. Maksudnya sejumlah 62 % masyarakat usia bekerjanya produktif secara ekonomi (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).

Menurut Zadek, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (*Collaborative Governance*), merupakan sebuah kemitraan publik dengan pihak swasta yang pada umumnya merupakan kerjasama antara negara dan non negara (NGO). Kolaborasi ini menunjukkan bentuk koalisi yang saling melengkapi antara berbagai pihak lalu menjadi satu kesatuan sudut pandang dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, setiap komponen sistem pemerintahan kolaboratif memiliki peran unik (Yasintha, 2020). Adanya tiga pelaku saling mempengaruhi pada tata kelola pemerintahan yakni; pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bagi pemerintahan kolaboratif, pemerintah bukan sebagai sentral satu-satunya pihak untuk mengatur serta mengelola pemerintahan, tetapi juga menggandeng pihak lain untuk mengatasi kekurangan mereka. Model *collaborative governance* memiliki titik fokus pada isu dan persoalan yang berkaitan dengan publik (hajat hidup orang banyak) yang disertai dengan penanganan terhadap masalahnya. Hal ini, tentu akan membantu menemukan solusi yang tepat untuk tata kelola kolaboratif pemerintahan (Bila & Saputra, 2019).

Sedangkan *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash menjadi model penanggulangan permasalahan antara satu maupun beberapa lembaga publik melibatkan para penyelenggara dan pemangku jabatan non negara (*stakeholders non state*). Ketika mekanisme perumusan kebijakan secara bersama bersifat formal, sepakat dan bijaksana sesuai dengan tujuan dalam menjalankan *public policy* serta pengelolaan agenda publik (Molla et al., 2021). Pandangan dari Ansell dan Gash mengenai kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, merupakan suatu struktur proses berjalannya *Collaborative Governance*. Kondisi awal memang penting untuk menetapkan tingkat kepercayaan, masalah, dan norma-norma yang bisa muncul sebagai peluang dan hambatan. Desain kelembagaan dijadikan sebagai pengatur asas untuk aktivitas kerja sama, dan kepemimpinan berfungsi sebagai perantara dan penyedia fasilitas pemerintahan kolaboratif. Proses Kolaborasi adalah sebuah esensi utama *Collaborative Governance*, yang mencakup dialog secara langsung (*face to face*), membangun keyakinan, prinsip yang kuat, berbagi pemahaman, dan berbagi hasil sementara (Molla et al., 2021).

Dalam artikel ini, peneliti berpandangan, pada dasarnya permasalahan mengenai pengangguran terbuka ini sangat menarik dan penting dibahas, karena secara tidak langsung memiliki dampak sosial, ekonomi serta politik, yang sekaligus berhubungan pada hajat hidup orang banyak. Selain itu, hal tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah dalam membangun kemajuan sebuah daerahnya, dalam arti jika jumlah tingkat pengangguran suatu wilayah/daerah semakin tinggi, maka ini menunjukkan kondisi perekonomian di lokasi tersebut juga semakin buruk.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (A. F. Putri & Mubarak, 2019) dengan judulnya mengenai *Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat* menyebutkan bahwa upaya yang telah dilakukan Disnakertrans masih belum dapat mengatasi persoalan pengangguran secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang cara yang telah dilakukan, dinilai dari varian Edward, yakni pada proses dialog yang dilakukan dapat dikatakan baik, tapi ada juga masyarakatnya pilah-pilih dalam menacari pekerjaan, sumber daya yang tersedia kurang optimal, sikap para penyelenggara yang cukup baik serta birokrasi dalam pelayanan yang mempunyai SOP cukup terlibat. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh (A. Putri & Azzahra, 2021) dengan judul *riset Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19* menyimpulkan bahwasanya ketika sebelum ataupun pada saat pandemic covid berlangsung, semua daerah provinsi yang Indeks Pemabngunan Manusia (IPM) rendah yakni di bawah angka rata-rata nasional menjadikan tingkat pengangguran terbuka sangat meningkat. Selain itu, pada peningkatan PDRB dan UMP juga menyatakan dampak perbedaan saat sebelum dan selama pandemi. Sebelum covid, UMP mempengaruhi tingginya TPT, tetapi selesai covid, IPM justru memiliki dampak terbesar.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mereka cenderung hanya membahas dan menjelaskan terkait faktor-faktor dan penyebab terjadinya tingkat pengangguran, tetapi tidak melihat dari akuntabilitas pemerintah dalam memberikan solusi alternatif yang mutakhir sebagai upaya penanggulangan gangguan tersebut. Dengan uraian pada permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menganalisis riset mengenai proses kinerja pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana taktik pemerintah dalam mengentaskan persoalan pengangguran yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Oleh sebab itu, kami melakukan riset dengan mengambil judul *Strategi Collaborative Governance dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Terbuka di Kota Pangkalpinang*.

METODE PENELITIAN

Berkenaan dengan fokus permasalahan dan tujuan penulisan penelitian, maka penelitian dilakukan dengan metode kualitatif eksplanatif mengenai pengangguran terbuka di kota Pangkalpinang pasca wabah pandemik covid-19. Penggunaan kualitatif eksplanatif dipilih dengan pertimbangan agar artikel ini dapat menerangkan terjadinya proses elaborasi antar pihak dalam penanggulangan masalah pengangguran yang meningkat di Kota Pangkalpinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari internet. Data yang telah didapatkan dianalisis secara mendalam dan diuji menggunakan data pembandingan lainnya yang berkaitan. Berdasarkan Creswell, dalam melakukan analisis data, perlu adanya usaha ilmiah untuk menjelaskan, lalu memaknai, dan kemudian menginterpretasikan dan merefleksikannya kedalam temuan penelitian. Peneliti menjadi menjadi instrument langsung dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi dalam hasil penyajian temuan dalam bentuk eksplanatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Permasalahan Pengangguran di Kota Pangkalpinang

Persoalan pada setiap pembangunan daerah menjadi kesenjangan, "Gap" antara prestasi pengembangan yang ada saat ini dengan apa yang sudah terencana serta sebuah cita-cita yang akan dipetik pada masa depan berdasarkan situasi nyata saat rencana telah disusun. Kota Pangkalpinang yang secara *de facto* pernah menjadi Ibukota Indonesia pada tahun 1959 masih bisa dikatakan cukup tertinggal jika dinilai terhadap kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Problem pembangunan yang terjadi di kota ini ditelusuri melalui komunikasi dan gejala perkembangan dari lini zona kejadian masalah standar lokal kota, regional maupun global pada kurun waktu kurang lebih lima tahun ke belakang. Salah satu problem utamanya terkait pada bidang tenaga kerja (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).

Penjelasan mengenai pengangguran terbuka, dimana kondisi pada setiap masyarakat yang termasuk dalam kelompok saat sedang berusaha untuk memulai kegiatan produksi, baik sedang dalam mencari pekerjaan ataupun mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum dapat bekerja (Dewi, 2020). Kota pangkalpinang dengan populasi sekitar 216.893 jiwa di tahun 2020, masih menghadapi peningkatan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ibukota dari Provinsi Bangka Belitung ini berusaha mengurangi masalah tersebut. Jumlah kemiskinan dan pengangguran di kota ini terus meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Semua itu bisa terlihat dalam data dikumpulkan oleh BPS kota tersebut.

Salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah serta sebuah target ekonomi makro pemda yaitu TPT, yang dijadikan pembanding antara total angkatan kerja dan total pencari kerja. Lebih penting lagi, selain angka kemiskinan, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Baik dalam satuan unit (orang) maupun persen, indikator pengangguran terbuka ini berguna sebagai referensi pemerintah untuk penciptaan pekerjaan baru. Selain itu, bertambahnya kesuksesan program tenaga kerja pada tiap tahunnya dapat ditunjukkan oleh perkembangannya (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).

Tabel 1. Analisa Pencapaian Sasaran TPT

Capaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka							
Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
TPT	%	5,05	5,01	99,21	5	6,93	61,40

Sumber : LAKIP 2019-2020

Menurut data yang bersumber pada LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2019 dan 2020, analisa tentang pencapaian sasaran strategis terkait tingkat pengangguran telah berhasil menurun. Hal ini di buktikan di tahun 2019 hasil capaian kinerjanya sebesar 99,21 persen dan dijelaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang sukses menyediakan lowongan pekerjaan untuk para masyarakat yang membutuhkan. Adanya sebuah elemen dalam mendorong kesuksesan tersebut dengan hadirnya para pengusaha yang menaruh saham atau modalnya di daerah, dengan begitu dapat menampung para pekerja lokal (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020)

Selanjutnya, pada tahun 2020 juga dikatakan masalah pengangguran berhasil diturunkan dengan target yang ditetapkan 5 persen dan pada kenyataannya terealisasi 6,93 persen. Selain itu, menjelaskan pula bahwa secara rata-rata hanya terdapat 69 orang dari totalan 1000 masyarakat yang termasuk angkatan kerja dan diantaranya merupakan orang yang sedang mencari kerja (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).

Tabel 2. Persentase Peningkatan TPT

Wilayah Bangka Belitung	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2018	2019	2020
Kepulauan Babel	3,65	3,62	5,25
Bangka	4,12	3,80	5,42
Belitung	2,93	2,90	4,82
Bangka Barat	3,11	2,85	4,12
Bangka Tengah	3,93	4,39	5,59
Bangka Selatan	4,35	3,87	5,42
Bangka Timur	1,50	1,71	3,93
Kota Pangkal Pinang	4,70	5,01	6,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018-2020

Namun, kenyataan yang terjadi, berdasarkan pada data yang disajikan di atas dapat membeikan gambaran kepada kita bahwa pada TPT Kota Pangkalpinang meningkat jadi 6,93 persen di tahun 2020 sesuai sasaran yang di tetapkan 5 persen, menunjukkan nilai capaian kinerja sebanyak 61,40 persen. Ini lebih tinggi dari kenaikan 1,92 persen pada tahun 2019. Bukti nyata ada kasus pandemi yang terjadi saat itu, hampir 90 persen dari 439 perusahaan bisnis di pangkalpinang terkena dampak dari covid tersebut, sehingga menyebabkan 11.600 orang terpaksa dirumahkan dan 195 pekerja dikeluarkan dari pekerjaan (PHK) (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2021).

Berlandaskan dari dua data LAKIP yang sudah dijelaskan di atas lalu dilakukan perbandingan dengan data dari BPS, terjadi ketidaksinkronisasian antara keduanya. Jika kita lihat dalam data BPS bahwa sesungguhnya tingkat pengangguran yang terjadi justru malah meningkat, bahkan dimulai sejak tahun 2018 perlahan naik tahun 2019 hingga sampai di tahun 2020 puncaknya, persentase rasio tingkat penganggurannya mencapai 6,93 persen. Meningkatnya kenaikan tersebut dapat dinilai buruk, apabila dijadikan sebagai penilaian untuk mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah dalam membangun kemajuan wilayahnya, yaitu dengan menciptakan masyarakat sejahtera.

Kemudian, bicara soal kualitas rumah tangga di Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan. Sebanyak 42,90 persen orang di Pangkalpinang memperoleh gelar tamatan SMA sederajat. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah 21,67 persen orang yang bekerja di Pangkalpinang ini merupakan tamatan SD. Menunjukkan bahwa kapasitas atau kemampuan para pekerja di Pangkalpinang rendah, sehingga nantinya berdampak pada gaji yang akan dibawa pulang (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2018).

Ansell and Gash dalam menjelaskan pada kondisi awal macam ini mendorong ketertarikan semua pihak kepentingan yang ada untuk bersama-sama melakukan kongsi, antara pihak dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang ada. Jika telah mengalami suka duka bersama, maka secara inisiatif akan bertumbuhnya tenggang rasa untuk saling membantu melalui kerjasama atau berkolaborasi. Oleh karena itu, semua itu harus jadi pandangan serius bagi Pemerintah, terkhusus pada lembaga yang memiliki keterkaitan dalam mengatasi masalah harus dicari sumbernya, agar tidak menjadi masalah besar bagi kesejahteraan warga (Molla et al., 2021).

2. Desain Kelembagaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Menekan Angka Pengangguran

Ansell and Gash memandang desain kelembagaan sebagai sebuah regulasi atau pengaturan yang jelas dan tata cara harus menjadi sudut pandang utama lain yang perlu mendapatkan perhatian. Penegakan aturan seyogyanya mesti dilakukan dengan berkeadilan, transparansi dan terbuka, harapannya para *stakeholders* ini bisa meyakinkan ketika ada dialog bersama atau bernego terbukti riil adanya serta tidak hanya omong kosong yang disampaikan untuk menyembunyikan konsensus yang telah dibuat (Molla et al., 2021).

Ketika melakukan pengendalian pada tingkat kota seperti Pangkalpinang, Indonesia, penanganan masalah pengangguran umumnya menjadi tanggung jawab dari beberapa instansi pemerintah setempat. Pola hubungan kerja sama yang telah dibuat harus bersandarkan dengan yakin dan kepercayaan serta kesepahaman tujuan yang dicapai. Mereka saling berkoordinasi satu sama lain secara intensif saat menyepakati hukum. Menurut Pitana dan Diarta (Kurniasih et al., 2023) menjelaskan bahwa regulasi merupakan otoritas sah diperoleh oleh lembaga instansi yang kemudian dapat digunakan sebagai pengelola maupun pengatur kegiatan dalam lingkup ranah hukum yang ada.

Pada desain kelembagaan dalam *collaborative governance* dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang pengangguran, peraturan ini memuat berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam menguatkan kapasitas SDM serta membuka lapangan kerja, seperti kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, program peningkatan kualitas pendidikan dan program pengembangan kewirausahaan

Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang isinya memuat sasaran penurunan angka pengangguran dan pengoptimalan kapasitas SDM. Alasan menggunakan dua Perpres sebagai bahan rujukan, karena sampai peneliti melakukan pencarian data belum adanya Peraturan Wali Kota secara resmi membahas terkait pengangguran di Kota Pangkalpinang.

Namun, pada level tingkat kota seperti Pangkalpinang, penanganan masalah pengangguran umumnya menjadi tanggung jawab dari beberapa instansi pemerintah setempat. Beberapa lembaga atau instansi yang terlibat dalam menangani masalah pengangguran di tingkat kota yaitu; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan NAKER) Kota Pangkalpinang: pada dasarnya dinas ini biasanya memiliki tanggung jawab atas aturan tentang penanaman modal dan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Selain itu, ada juga Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pangkalpinang: meskipun fokus utama dinas ini bicara terkait dengan kesejahteraan sosial, tetapi dinas ini dapat terlibat dalam membantu kelompok rentan, termasuk didalamnya pengangguran. Melalui bidang pemberdayaan sosial dilakukan program kesejahteraan sosial dan bantuan untuk mengurangi angka pengangguran. Menurut sumber dari LAKIP Kota Pangkalpinang tahun (2019-2020) pemerintah telah melakukan sebuah upaya untuk menekan angka pengangguran saat masa pandemi Covid. Adapun jenis program yang telah dilakukan diantaranya (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2020, 2021):

- 1) Program pembinaan bagi perusahaan harus memberikan laporan terbukanya lowongan penerimaan tenaga kerja
- 2) Kegiatan pelatihan ketrampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan produktifnya para pekerja
- 3) Agenda penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
- 4) Siasat mengembangkan kewirausahaan atau UMKM
- 5) Strategi penguatan kualitas aparturnya dengan penyediaan diklat, bimbingan, study banding dan lain-lain

Bersumber pada program diatas, telah dilakukan oleh Pemerintah, pada pengimplementasiannya masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan semua itu memiliki faktor penghambatnya yaitu; *Pertama*, setiap orang yang mencari kerja hampir kebanyakan kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan masih kurang memuaskan, sehingga menyebabkan masyarakat ingin kerja belum beruntung mendapatkan kesempatan bekerja. *Kedua*, proses dalam informasi mencari lowongan kerja masih minim. *Ketiga*, para tenaga kerja belum dapat memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan (Saputra, 2022)

Terlepas dari semua faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, faktor penyebab utamanya adalah karena situasi dan kondisi pada saat itu Indonesia sedang mengalami kasus pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh aktivitas kegiatan harus dibatasi dengan kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga program yang telah dilakukan menjadi terhambat dalam menekankan angka pengangguran yang terjadi. Sebagaimana juga dikatakan dari hasil riset Stevanus C Handoko yang dikutip dalam (Safitri & Dewa, 2022) dengan adanya wabah pandemi menyumbang efek buruk yang menghambat sebuah rencana program yang sudah terbentuk maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Sebuah kunci kesuksesan yang mempengaruhi kerja sama, salah satunya juga dengan kepemimpinan fasilitatif. Hal ini seperti yang dijelaskan Ansell dan Gash menginstruksikan pada para pemimpin di setiap lembaga di bawah kendali orang yang berjiwa fasilitatif, yaitu sesosok pemimpin harus mampu menjadi fasilitator seluruh *stakeholders* untuk berunding, berdialog dalam suatu forum meja resmi, saling berdiskusi *face to face*, tukar tambah pikiran, meraih kepercayaan, komitmen, melakukan taktik atau rencana untuk diwujudkan sebagai satu kesatuan tujuan kolektif (Molla et al., 2021)

Dalam kaitannya dengan penanganan masalah pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pasca pandemi Covid, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil yang biasa akrab dipanggil Molen bisa dikatakan sesosok pemimpin berkarakter fasilitatif. Melihat posisi dirinya sebagai Wali Kota, Molen berhasil memperlancar komunikasi baik yang menjembatani pihak pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat untuk melakukan upaya kerja sama dalam menekankan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang. Terbukti pada 21 Desember tahun 2021, Wali Kota Pangkalpinang yang bersama Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Litbang menghadiri kegiatan Focus Group Discussion yang diinisiasikan oleh Bappeda. Acara yang berlangsung di Gedung Tudung Saji tersebut, mengangkat tema tentang langkah penyegaran ekonomi selepas pandemi yang melanda Indonesia, khususnya wilayah Kota Pangkalpinang.

Narasumber yang hadir diantaranya; pimpinan KPPN Kota Pangkalpinang, pimpinan BPS kota setempat, Kepala Deputy Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung, serta dihadiri Organisasi Perangkat Daerah. Pada kata sambutannya, Molen menjelaskan bahwa dalam melakukan perbaikan ekonomi setelah pandemi, perlunya kita memperhatikan pada unit yang bisa memberikan kontribusi cepat bagi peningkatan ekonomi. Molen mengatakan, akibat dari banyak pengangguran membuat Kota Pangkalpinang berada pada angka kemiskinan yang melonjak tinggi dibanding pada kota-kota lainnya (Admin, 2021)

Berdasarkan berita dari Bangkapos.com, Maulan Aklil juga berkesempatan melihat dan turun tangan mengajak para angkatan kerja untuk datang langsung ke lokasi bursa kerja (*job fair*) yang berada di lingkungan DPMPSTSP & Naker Kota Pangkalpinang. Lebih lanjut, Molen juga menjelaskan bahwa pemerintah kota sudah menciptakan suasana investasi yang ramah bagi para pelaku usaha atau perusahaan yang ingin menanamkan modalnya. Selain itu, pemerintah kota juga mengutamakan putra-putri daerah dan pengusaha lokal untuk berinvestasi di Pangkalpinang agar uang dapat berputar di daerah itu. Pemerintah kota juga berharap agar masyarakat dapat menjaga kondisi aman dan damai agar para investor tertarik datang ke Pangkalpinang (Yoga et al., 2023).

Lebih lanjut, dengan adanya informasi serta data yang telah peneliti temukan, peneliti dapat melihat *political will* dari Pemerintah Kota pangkalpinang dalam menurunkan angka pengangguran. Secara konseptual yang dimaksud *Political Will* oleh Brinkerhoff yaitu kemauan dan komitmen oleh seorang pemimpin politik dalam mewujudkan aksi yang nyata dengan tujuan agar program tersebut terlaksana dengan baik dibarengi atas usaha yang berkelanjutan (Azizah et al., 2020). Sehingga dapat dimaknai bahwa *political will* semacam "niatan seorang pemimpin" ketika menjalankan suatu usaha yang dapat dinilai patut untuk kemaslahatan bersama dalam jangka panjang.

Maka ketika bicara *political will* ini bersumber pada visi dan misi seorang pemimpin. Dalam hal ini yaitu visi dan misi dari Dr. Maulan Aklil, S.IP, M.Si (Molen) sebagai Wali Kota Pangkalpinang yang telah menjabat dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kota Pangkalpinang (2018 - 2023) bahwa visinya "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur" (SENYUM) dan pada misinya disebutkan, salah satunya yaitu memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dimana di dalamnya juga menyinggung soal penurunan pengangguran (Bappeda Kota Pangkalpinang, 2018).

Pada visi tersebut, terdapat dua kosa kata "sejahtera" dan "makmur". Artinya pemerintah harus bisa memastikan bahwa masyarakatnya itu dapat hidup dengan layak sejahtera sesuai dengan strata sosialnya sendiri-sendiri dan tidak terjadi banyaknya pengangguran dimana-mana. Namun, kenyataannya yang terjadi pada tahun pertama (2019) sampai kedua (2020) menjabat, Maulan Aklil belum mampu menurunkan angka pengangguran dan justru malah terus naik secara bertahap diperparah lagi puncaknya pada saat covid.

Walaupun demikian, Molen tidak tinggal diam bahkan terus berupaya memperbaiki masalah pengangguran yang meningkat pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan ketika di tahun ketiga (2021), pada saat pandemi covid sudah mulai mereda, Molen bersama dengan OPD (DPMPSTSP dan Naker) melakukan strategi guna memajukan tingkatan angkatan kerja yang ditempatkan dan mengoptimalkan laju pertumbuhan realisasi investasi (Sekretaris DPMPSTSP & NAKER, 2022). Berikut strategi yang telah dijalankan:

1) Memberikan Pencari Kerja Pendidikan Dan Pelatihan

Pada Juli 2021, 45 orang yang sedang mencari pekerjaan telah dilatih dalam tiga bidang keahlian: teknik mobil, TIK dan barista. Selain itu, anggaran untuk pelatihan karyawan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mencakup empat kategori kejuruan yang berbeda.

2) Fokus Dan Pengawasan Hubungan Industrial Perusahaan Dan Karyawan

Bimbingan teknis diberikan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pembentukan lembaga kerja sama bipartite saat bidang tenaga kerja masih menjadi satu dengan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Di sisi lain, pada tahun 2021, DPMPTSP & NAKER memberikan pengarahan teknis prosedur membuat aturan perusahaan seklaigus kontrak kerja, serta bimbingan untuk pengurus unit kerja serikat pekerja.

3) Memaksimalkan Promosi Investasi. Pada tahun 2021, strategi promosi telah dibuat, mencakup:

- Bekerja sama antara Pemkot Pangkalpinang dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan infrastruktur di bidang yang menjadi prioritas, yaitu pariwisata, industri dan perdagangan, serta perikanan dan kelautan.
- Menyediakan kemudahan tata cara pelayanan pada perusahaan luar untuk menaruh saham modalnya
- Mendesain peta kawasan investasi untuk memberi investor pemahaman yang jelas tentang kawasan investasi
- Menyebarkan promosi melalui media sosial dan sarana lainnya tentang keunggulan Pangkalpinang di sektor prioritas
- Meningkatkan SDM pada sekolah vokasi agar SDM ada siap bersaing di pasaran
- Menaikan komisi pajak untuk industri tambak ikan, mempermudah perizinan, serta meningkatkan potensi perikanan. Penting bagi kota ini untuk menunjukkan keunggulannya dalam bidang perikanan dan kelautan serta memiliki akses ke pelabuhan untuk ekspor dan impor. Akibatnya, sektor ini telah dipilih sebagai sektor prioritas di kota ini.

4) Membuat Peraturan Yang Mendukung Investasi Di Kota Pangkalpinang : dengan merevisi Peraturan Insentif dan Kemudahan Penanaman modal agar sesuai dengan UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, pada tahun keempat (2022) Wali Kota Pangkalpinang mendukung secara langsung agenda dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Ada tiga skema acara KADIN yang akan bekerja sama dengan Pemkot Pangkalpinang, adapun salah satu programnya yaitu: program pembuatan spanduk nama untuk UMKM yang belum memilikinya. Dengan tujuan adalah untuk membuat nama usaha mereka mudah dikenal oleh masyarakat luas. Target sasaran utamanya sudah dimulai dari gang permukiman, warung atau toko. Program dengan aksi nyata yang menguntungkan pasti akan dihargai oleh Wali Kota Pangkalpinang dan didukung sepenuhnya. Molen juga mengajak semua pihak yang terkait untuk dapat andil ambil bagian kesempatan dalam meningkatkan UMKM di Kota Pangkalpinang (Eka, 2022).

Selain itu, Pemkot melalui Dinas PMPTSP dan Naker juga menyediakan program *Job Fair 2022* yang dilaksanakan selama 2 hari dengan lokasi halaman yang telah disediakan. Acara tersebut resmi dibuka oleh Wamen ketenagakerjaan RI. Dalam kegiatan tersebut adanya ketersediaan lowongan pekerjaan sebanyak 20 perusahaan atau pelaku usaha di kota tersebut dengan lowongan pekerjaan sebanyak 400 (Ginta, 2022).

Maulan Akhil juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa menunjukan partisipasi atau kesungguhan dalam mengikuti program ini. Akhirnya banyak angkatan kerja yang berdatangan untuk ikut terlibat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 135 lamaran kerja menyerbu salah satu pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani (PNM), dimana dalam satu hari pertama diadakanya program *job fair* ini. Masyarakat juga menganggap dalam program tersebut berdampak baik untuk keberlanjutan mencari pekerjaan dan PNM sebagai sektor swasta dapat membantu pemerintah dalam penurunan tingkat pengangguran terbuka di Pangkalpinang (Hasanah, 2022)

Berbicara tentang strategi pemerintah, peneliti juga menemukan hasil riset yang telah dilakukan oleh (Antika et al., 2022) terkait *Efektivitas Program Pelatihan & Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Oleh Dinas Naker Kota Cimahi Pada Masa COVID-19 Tahun 2021*, dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Naker telah mensosialisasikan kegiatan pelatihan kerja kepada masyarakatnya dengan baik, yakni lewat sebuah aplikasi SILIMA, serta medsos seperti; facebook dan instagram. Program yang dibuat memiliki misi untuk menurunkan rasio pengangguran yang ada di kota tersebut, agar pencari kerja memperoleh kemampuan dan keterampilan, sehingga mereka dapat bersaing dengan baik.

Jika dibandingkan pada penelitian Kota Cimahi di atas, dapat kita lihat pemerintahnya bisa menurunkan tingkat pengangguran dengan sosialisasi online. Hal ini bisa menjadi sebuah solusi alternatif bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mensosialisasikan terhadap program yang telah dibuatnya melalui aplikasi, guna memudahkan masyarakat dalam mengikuti bagaimana pentingnya program itu dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang. Program yang disediakan dijelaskan secara rinci dalam metode online.

Kemudian, pada riset yang dilakukan oleh (Kusuma Devi et al., 2022) dengan judulnya *Strategi Program PPKD Jakarta Selatan Melalui Program Latihan Kerja Dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Masa Pandemi Covid 19*, dijelaskan bahwa dengan penggunaan media klinik pelatihan, tingkat penyerapan pada tenaga kerja memberikan hasil yang cukup signifikan. Selain itu, pendekatan *Triple Skilling* yang dilakukannya dapat membantu pengembangan program. Program yang dibuat berfungsi sebagai penguatan kapasitas siswa melalui praktik kerja (magang) serta peningkatan kompetensi instruktur mampu mendorong perbaikan kualitas pendidikan dan perluasan kesempatan kerja.

Pada hasil penelitian Kota Jakarta Selatan di atas, terlihat bahwa cara pemerintah dalam mengatasi pengangguran sudah cukup baik dengan menggunakan media klinik pelatihan khususnya bagi para siswa diberikan kesempatan program praktek atau magang. Kegiatan semacam ini juga bisa menjadi solusi lainnya bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menerapkan pendekatan *Triple Skilling* dengan tujuan memberikan kesempatan bagi para siswa sekolah kejuruan untuk ikut magang atau praktik kerja, sehingga mampu mendorong SDM yang siap dengan dunia kerja serta dapat mengurangi kesenjangan terhadap pengangguran di Kota Pangkalpinang

Faktor kepemimpinan memang kuat hubungannya pada kekuasaan serta jiwa pribadi orang tersebut. Sebagai halnya telah dijelaskan oleh Fridayana dalam (Angga & Iskandar, 2022) bahwa kepemimpinan itu merupakan perilaku atau seni seseorang untuk dalam mempengaruhi perilaku orang lain maupun kelompok lainnya. Dalam hal ini peranan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berhasil menarik simpati masyarakat dan juga berhasil menghadirkan para investor untuk mampu berbenah menurunkan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang.

4. Proses Kolaborasi (*Collaboration Process*)

Proses kolaborasi yang dimaksud oleh Ansell and Gash yaitu adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam menciptakan keyakinan melalui proses komunikasi saling bertemu face to face untuk dapat menumbuhkan rasa percaya yang diharapkan akan membawa pengaruh baik terhadap komitmen selama proses kerja sama, yang kemudian memunculkan saling percaya satu dengan yang lainnya dan hasil sementara. Dalam hal ini, proses kolaborasi merupakan variable yang penting untuk menentukan keberhasilan collaborative governance (Kurniasih et al., 2023)

Esensi dari proses kolaborasi pada percepatan penurunan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang, menggambarkan bagaimana bentuk upaya penyatuan yang dikerjakan pemerintah dalam menggandeng masyarakat, akademisi dan pihak swasta dalam rangka meredakan masalah pengangguran. Semua hal itu telah tergambarkan dengan jelas dan nyata dilaksanakan oleh Pemkot Pangkalpinang. *Pertama, kolaborasi pihak pemerintah dengan masyarakat.* Dapat dibuktikan dengan adanya program *Job Fair* di tahun 2022. Acara tersebut di selenggarakan oleh Pemkot melalui Dinas PMPTSP dan Naker dan dilaksanakan selama 2 hari dengan lokasi halaman yang telah disediakan (Ginta, 2022).

Lebih lanjut, dilaksanakannya juga program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat angkatan kerja oleh OPD Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna mempersiapkan SDM angkatan kerja yang berdaya saing di pasar global (Sekretaris DPMPTSP & NAKER, 2022). *Kedua, kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi.* Terbukti adanya upaya pihak pemerintah menggalakkan kegiatan peluang kerja dengan basis wilayah yang dilakukan oleh Kemnaker dan universitas IPB. Seorang ahli dari Universitas IPB, menyatakan bahwa program pelatihan dan pendampingan ini ditujukan untuk mempersatukan sumber daya sekaligus pelaku usaha TKM pada sebuah wilayah dengan menyeluruh agar TKM dapat berperan dalam semua aspek kewirausahaan. Dengan begitu, dapat mengembangkan lebih banyak kesempatan kerja diandalkan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Seftia, 2022)

Berikutnya yang *ketiga, kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta.* Aksi ini dapat tergambarkan melalui adanya kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor luar yang akan menanamkan modalnya melalui digitalisasi dan harapan tidak perlu waktu berlarut-larut dalam melakukan proses perizinannya. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah secara tidak langsung telah memberikan dampak besar kepada masyarakat pada terbukanya lapangan pekerjaan (Jati, 2022).

Tabel 3. Persentase Penurunan TPT

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	2020	2021	2022
Pangkal Pinang	6,93	6,81	5,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2022

Bentuk upaya kolaboratif telah dikerjakan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengurangi angka pengangguran terbuka yang melonjak tinggi selama pandemi COVID-19 dikatakan cukup baik. Sebagaimana, bersumber informasi dari BPS, TPT yang terjadi selepas pandemi di Kota Pangkalpinang (2020-2022) telah mengalami penyusutan sejumlah 1,93 persen. Kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, akademisi dan swasta menjadikan langkah kongkrit kolaborasi kuat, mendukung penyelesaian persoalan pengangguran terjadi.

Menurut kepala BPS Kota Pangkalpinang, Ahmad menyatakan, selama di tahun 2022 sejumlah 817 orang sudah mulai dapat pekerjaan, namun hal itu masih meninggalkan sebanyak 6.479 orang yang menganggur di Pangkalpinang. Beliau juga menyebutkan bahwa faktor dari menurunnya angka TPT adalah berkembang pesatnya nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya kegiatan bursa kerja (*job fair*) yang dilakukan oleh pemerintah (Marlianto, 2023). Pada konsepnya mempunyai tingkat fleksibilitas kuat merupakan dasar dari *collaborative governance*. Pihak pemerintah harus terus bertekad menyelesaikan masalah TPT dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM yang dimilikinya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera.

KESIMPULAN

Dengan adanya riset serta bahasan di atas, dapat kita ambil sebuah konklusi bahwa strategi *Collaborative Governance* Pemkot Pangkalpinang dalam menangani kasus TPT sudah berjalan cukup baik, jika dilihat mulai dari kondisi awal masalahnya hingga sampai proses kolaborasi yang dilakukannya. Beberapa bentuk kolaborasi yang telah dilakukan, diantaranya :

- 1) Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat : Dibuktikan dengan adanya program Job Fair di tahun 2022. Selain itu ada program pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat angkatan kerja oleh OPD tenaga kerja Kota Pangkalpiang
 - 2) Kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi : Dibuktikan juga dengan program kesempatan kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB
 - 3) Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dengan memberikan kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor luar yang akan menanamkan modalnya melalui digitalisasi
- Dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* Pemerintah Kota Pangkalpinang, tim peneliti menyediakan rekomendasi mengenai persoalan TPT tersebut, diantaranya:
- 1) Pada proses penanganan masalah pengangguran, Pemerintah Kota Pangkalpinang bisa mencontoh dari Pemerintah Kota lainnya dalam menurunkan angka pengangguran di wilayahnya, seperti; Kota Cimahi yang menggunakan aplikasi digital dalam pelaksanaannya dan Kota Jakarta Selatan yang menggunakan klinik pelatihan dengan pendekatan *Triple Skilling*
 - 2) Selain itu, harus adanya kebijakan atau regulasi dari Wali Kota yang jelas untuk mengatur secara resmi membahas terkait pengangguran di Kota Pangkalpinang.

REFERENSI

- Admin. (2021). *Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid – 19 Di Kota Pangkalpinang*. Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang. https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/informasi_publik/detail/strategi-pemulihan-ekonomi-pasca-covid--19-di-kota-pangkalpinang
- Angga, A., & Iskandar, S. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 5295–5301. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2918>
- Antika, G. A., Kurnia, D., & Munawaroh, S. (2022). Analisis Kritis Terkait Efektivitas Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Pada Masa Covid-19 Tahun 2021. *Jurnal Caraka Prabhu*, 6(1), 42–64. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1051>
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(April), 50–62.
- Bappeda Kota Pangkalpinang. (2018). *RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023*. <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/wp-content/uploads/2021/07/RPJMD.pdf>
- Bappeda Kota Pangkalpinang. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019*. https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/LAPORAN_AKUNTABILITAS_KINERJA_PEMERINTAH_KOTA_PANGKALPINANG_TAHUN_2019.pdf
- Bappeda Kota Pangkalpinang. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*. https://bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/LAKIP_2020.pdf
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Dewi, S. (2020). Pengangguran Terbuka: Kasus Di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 43–46.
- Eka. (2022). *Molen Dukung Aksi Nyata Program Kadin Pangkalpinang Untuk Kota Beribu Senyuman*. Diskominfo. <https://website.pangkalpinangkota.go.id/molen-dukung-aksi-nyata-program-kadin-pangkalpinang-untuk-kota-beribu-senyuman/>
- Fahri, Jalil, A., & Kasnelly, S. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Di Tengah Pandemi (Covid-19). *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60. <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/142>

- Ginta. (2022). *Job Fair 2022 Pemkot Pangkalpinang Resmi Dibuka oleh Wamen Ketenagakerjaan RI*. BANGKA BELITUNG, Www.Wowbanel.Com. <https://www.wowbanel.com/lokal/pr-5985946099/job-fair-2022-pemkot-pangkalpinang-resmi-dibuka-oleh-wamen-ketenagakerjaan-ri>
- Hasanah, A. D. (2022). *Job Fair Pemkot Pangkalpinang, 135 Pencari Kerja Masukan Lamaran*. BANGKAPOS.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2022/12/06/job-fair-pemkot-pangkalpinang-135-pencari-kerja-masukan-lamaran>
- Hendartyo, M. (2020). *BPS: Pengangguran Terbuka Naik Jadi 7,07 Persen pada Agustus 2020*. Tempo.Com. https://bisnis.tempo.co/read/1402510/bps-pengangguran-terbuka-naik-jadi-707-persen-pada-agustus-2020?page_num=2
- Jati, R. P. (2022). *Mempermudah Investasi untuk Pengembangan Kota Pangkal Pinang*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/19/mempermudah-investasi-untuk-pengembangan-kota-pangkal-pinang>
- Kurniasih, Y., Suwitri, S., & ... (2023). Collaborative Governance Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Temanggung. ... and Local Governance, 7(1), 68–76. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7438>
- Kusuma Devi, N., R.Madhakomala, R. M., & Sutanto, S. (2022). Strategi Program PPKD Jakarta Selatan Melalui Program Latihan Kerja dalam Mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Masa Pandemi Covid-19. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 3(5), 375–381. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss5pp375-381>
- Marlianto, C. (2023). *BPS Pastikan Tingkat Pengangguran di Pangkalpinang Terus Turun, Ini Penyebabnya*. BANGKAPOS.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2023/02/08/bps-pastikan-tingkat-pengangguran-di-pangkalpinang-terus-turun-ini-penyebabnya?page=all>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijing Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipks.v6i2.1790>
- Putri, A., & Azzahra, A. (2021). Perbandingan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i2.13605>
- Putri, A. F., & Mubarak, A. (2019). Implementasi Strategi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dalam Menanggulangi Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat. *Journal Of Residu*, 3(20), 25–33.
- Safitri, L. A., & Dewa, C. B. (2022). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala Kecil Dan Menengah Makanan Dan Minuman. *Jurnal Manajemen Dayasaing*, 23(2), 97–107. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16180>
- Saputra, E. (2022). *6.997 Orang di Pangkalpinang Menganggur, Ini Penyebab dan Dampaknya*. BANGKAPOS.Com. <https://bangka.tribunnews.com/2022/08/04/6997-orang-di-pangkalpinang-menganggur-ini-penyebab-dan-dampaknya?page=all>
- Seftia. (2022). *Bersama Kementerian Ketenagakerjaan Dan IPB University, Pemkot Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan*. Diskominfo. <https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan/>
- Sekretaris DPMPSTP & NAKER. (2022). *LKJIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021*. <https://dpmpstpnaker.pangkalpinangkota.go.id/web/wp-content/uploads/2022/02/LKJIP-2021.pdf>
- Verianty, W. A. (2022). *12 Penyebab Pengangguran di Indonesia, Pahami Dasar Permasalahannya*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/5054591/12-penyebab-pengangguran-di-indonesia-pahami-dasar-permasalahannya?page=4>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Yoga, S., Manullang, R. R., & Panjaitan, F. (2023). ANALISIS PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP TINGKAT PENJUALAN PADA CANDU COFFEE DI KOTA PANGKALPINANG. *JURNAL PROGRESIF MANAJEMEN BISNIS (JPMB), STIE-IBEK, VOL 10 No*, 115–123.